



PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PROGRAM KAMPUNG PENDIDIKAN DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

Citra Darminto¹, Haryadi²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

E-mail : darmintocitra2014@gmail.com

Abstrak

Pendampingan dalam pengelolaan Kampung Pendidikan ini bertujuan untuk memberi masukan atas kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk mengelola program Kampung Pendidikan yang belum optimal. Sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014, bahwasanya desa diberikan kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Kewenangan desa telah diberikan berdasarkan hak usul desa yang mencakup urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada desa. Desa memiliki kewajiban dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demi tercapainya hal tersebut ditunjang pula dengan kebijakan Desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk dapat memanfaatkan Dana Desa sebaik-baiknya dengan keterlibatan masyarakat untuk membantu suatu kawasan terpadu yakni Kampung Pendidikan Desa Simpang Empat Sungai Tutung yang mana didalam kawasan tersebut terdapat program pendidikan formal dan pendidikan non formal. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi serta bertujuan menggali potensi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa, Kampung Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Assistance in the management of the Education Village is intended to provide input on licensing submitted by the Simpang Empat Sungai Tutung village government for management of the Education Village program that is not yet optimal. In accordance with law No. 6 of 2014, that villages were given the authority to conduct governance in accordance with the interests of village communities. The village authority has been granted based on the village proposal right which regulates the government affairs given by the regency / city that has been given to the village. Villages that have a commitment in providing supportive governance for the welfare of their communities. In order to achieve this, it is also supported by the policy of the Simpang Empat Sungai Tutung Village to be able to use the Village Fund as well as possible with community support to help the district sponsored by the Simpang Empat Sungai Tutung Village Education Village which includes formal and non-formal education programs. Therefore, the socialization of community service is expected to provide better results and solutions to problems that occur and help increase the potential of the village in the context of developing community empowerment.

Keywords: Village Funds, Education Village, Community Empowerment.

1. PENDAHULUAN

Demi tercapainya kemajuan dan kemandirian Daerah perlu diadakannya pengembangan yang ada di Daerah, oleh sebab karna itu, maka strategi pemerintahan yang ada perlu dimaksimalkan sedemikian rupa, sehingga capaiannya dapat maksimal guna mendukung peningkatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Munculnya otonomi daerah membuat penyelenggaraan daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Otonomi berlangsung menjadikan daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, hal ini terjadi agar daerah dapat mengetahui kebutuhannya masing-masing.

Sepanjang perjalanan dari waktu kewaktu pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana desa sebagai daerah otonom baru diberi kuasa penuh untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan seluas-luasnya. Desa diberi kewenangan dalam mengatur serta mengelola desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Setelah di terbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran peran desa yang semula berperan sebagai local state government, maka saat ini desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga desa mampu mewujudkan perannya sesuai dengan amanat otonomi desa (Nilawati:2018).

Adanya otonomi desa, desa memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan, kebutuhan akan pelayanan publik, serta mencakup aspek yang menjadi kepentingan masyarakat desa, maka diperlukan adanya sebuah lembaga dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan usaha-usaha yang dikira menjadi potensi dari desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendorong berjalannya program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangatlah dominan dalam mewujudkan tercapainya harapan guna menumbuhkan percepatan perekonomian masyarakat. Terbitnya undang-undang otonomi desa diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa menuju taraf yang lebih baik. Hal inilah yang nantinya akan munculnya tata kelola masyarakat desa yang lebih partisipatif dan akuntabel dalam memenuhi perekonomian menuju kesejahteraan.

Otonomi desa diharapkan menjadikan desa dapat mandiri di berbagai aspek demi tercapainya kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa. Dengan pengoptimalan potensi desa dengan maksimal, desa dapat mengurangi beban dari pemerintah pusat, hal ini desa dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Kemandirian desa tentunya tak lepas dari pengelolaan desa oleh seperangkat pemerintahan desa yang berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat desa. Terwujudnya kemandirian desa demi tercapainya desa yang sejahtera, maka desa mencari dana sendiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi didesa, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendapat bantuan dari APBN pusat yang dikenal dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Namun bukan serta merta desa hanya menerima dan mengandalkan hibah dari APBN semata. Desa perlu mengembangkan keuangan desanya sendiri dengan mengembangkan potensi desa baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) guna mencapai pendapatan asli desa yang maksimal.

Pembangunan desa dicapai dengan dengan pengelolaan yang baik dari keuangan desa itu sendiri. Pada dasarnya bantuan pendapatan asli desa masih berorientasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Sehingga apabila hanya mengandalkan sebatas bantuan yang di luncurkan oleh pemerintah maka pengelolaan dan pembangunan yang ada didesa tak akan maksimal. Hal inilah desa perlu mengembangkan dan adanya pengaturan pengelolaan pendapatan asli Desa.

Dana Alokasi Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan Program Inovasi Desa (PID) sebagai ruang untuk pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan desa menggunakan Dana Desa. Secara umum Program Inovasi Desa (PID) bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan terbuka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa.

Dalam kajian sebelumnya, seperti dalam skripsin yang berjudul "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam yang disusun oleh M. Indra Maulana mengatakan bahwa Arah Pemberdayaan Masyarakat Desa yang paling akan efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat, baik masyarakat umum, maupun masyarakat kurang mampu serta keterlibatan unsur pemerintahan yang

memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa (Maulana: 2018).

Dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 yang disusun oleh Risma Hafid mengatakan bahwa Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan suatu proses pembangunan (Hafid:2017).

Berdasarkan apa yang diungkapkan dalam dua penelitian sebelumnya diatas layanan partisipasi masyarakat atau yang sering juga disebut hubungan lembaga dan masyarakat memperlihatkan upaya bersama-sama dalam pembangunan. Ini memperlihatkan bahwa layanan partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun suatu lembaga yang dapat mengelola ataupun memberdayakan masyarakat agar dapat menjadi lebih baik. Wujud layanan tersebut lebih menekankan pada mengelola komunikasi antara lembaga dengan masyarakat dan inilah yang telah dilakukan oleh sekelompok pemuda bersama tokoh masyarakat di Desa Simpang Empat Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

Hasil dari komunikasi ini melahirkan ide untuk membangun sebuah kawasan terpadu dengan menggabungkan unsure kampung dan pendidikan, kampung pendidikan ini menyediakan program-program baru baik program pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dibentuk oleh pengurus seperti pendidikan usia dini, tidak berhenti disini saja pengurus semakin menambah kegiatan di kawasan ini dengan membentuk kegiatan yang mendukung tercapainya sebuah kegiatan yang berbasis pendidikan termasuk kegiatan kelompok kewirausahaan, seperti peternakan, pertanian dan perkebunan. Disamping pendidikan formal pengurus juga telah membentuk pendidikan non formal seperti keterampilan khusus seperti computer, bahasa Arab dan Bahasa Inggris, teknisi dan lain-lain.

Dalam hal ini masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya tingkat keberhasilan dan besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang difokuskan. Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah sebagai penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format keperintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

2. BAHAN DAN METODE PENGABDIAN

Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa ini dilakukan sesuai dengan persoalan yang telah dikemukakan pada bagian permasalahan dan solusinya. Maka metode yang digunakan yaitu :

- a. Mengidentifikasi pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan di desa Simpang Empat Sungai Tutung,
- b. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa,
- c. Melakukan Identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh desa Simpang Empat Sungai Tutung. Pada tahapannya akan diawali dengan pemberian sosialisasi tentang pentingnya masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan.

Pada tahapan ini Dosen, mahasiswa dan para stakeholder secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan ini pula diharapkan mampu mengubah pola pikir dan pola tindak masyarakat desa tentang partisipasi pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan, diharapkan kegiatan ini dapat mengatasi persoalan tersebut, serta diharapkan juga kegiatan ini dapat memberdayakan elemen masyarakat di Desa Simpang Empat Sungai Tutung itu sendiri, bisa dari kaum muda dengan karang tarunanya, ataupun kaum perempuan Desa Simpang Empat Sungai Tutung, atau elemen lainnya di desa yang merasa sanggup dalam memanfaatkan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan yang akan dilakukan secara kontinyu. Tentu sebelumnya mahasiswa akan diberikan pembekalan oleh dosen

pembimbing lapangan tentang urgensi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan dan juga target yang akan dicapai melalui program ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan pengajaran di sekolah membantu anak, bukan hanya mengerti teori, tetapi juga membentuk karakter belajar yang terstruktur dan baik. Namun, tanggung jawab pendidikan bukanlah sepenuhnya terletak pada sekolah. Kunci keberhasilan pendidikan adalah adanya keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Tutung, Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Hal ini, selaras dengan UU No. 35 Tahun 2014, Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Anak. Langkahnya, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah desa simpang empat sungai tutung melakukan pembinaan di masyarakat melalui lomba untuk mewujudkan Kampung Pendidikan. Tujuannya, untuk menciptakan kondisi daerah tinggal untuk anak-anak yang nyaman dan aman bagi proses tumbuh kembangnya dengan dukungan masyarakat yang menjamin pemenuhan hak anak dan mengupayakan perlindungan anak secara optimal.

Adapun Hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah: 1) meningkatnya pengetahuan stake holder masyarakat sungai tutung kecamatan air hangat timur tentang pengelolaan dana desa; 2) Pemerintah desa sungai tutung dapat memahami dan mengetahui mekanisme dalam pemanfaatan dana desa; 3) Masyarakat Sungai Tutung dapat berkontribusi dalam pembangunan desa sungai tutung, 4) Pemerintah Desa Pendidikan Simpang Empat Sungai tutung untuk masyarakat dan generasi muda setempat. Di bawah ini beberapa tahapan dan langkah pengabdian kepada masyarakat.

1. Mengidentifikasi pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa dalam menunjang program Kampung Pendidikan di desa Simpang Empat Sungai Tutung.

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (observasi, survey, dsb).

Salah satu langkah dalam pengabdian ini tim pengabdian mencoba melakukan identifikasi awal terkait permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa simpang empat sungai tutung dalam

pemamfaatan dana desa dalam menunjang program kampung pendidikan. Proses Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa simpang empat sungai tutung ini merupakan tahap awal yang dihadiri langsung oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) yaitu Citra Darminto, S.IP., M.M dan dibantu oleh beberapa dari Tim Mahasiswa bersama para stake holder desa simpang empat sungai tutung untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Gambar 1:

Perbatasan Desa Simpang Empat Sungai Tutung



dalam diskusi yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat bersama pemerintah desa simpang empat sungai tutung ditemukan beberapa permasalahan dalam menunjang program kampung pendidikan di desa simpang empat sungai tutung, diantaranya permasalahannya adalah minimnya sarana dan prasarana serta kurang Sumber daya manusia yang menjadi penggerak di kampung pendidikan desa sungai empat sungai tutung ini. Dari hasil diskusi ini sehingga tim PKM membuat suatu opsi solusi atau tawaran kepada pemerintah desa atas permasalahan yang dihadapi dengan diadakannya suatu sosialisasi serta pelatihan terhadap pengelolaan dana desa serta pelatihan pengembangan skill SDM bagi masyarakat desa simpang empat sungai tutung.

2. Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Pemanfaatan Dana Desa serta Peningkatan Skill SDM Masyarakat Desa Simpang Empat Sungai Tutung.

Penyampaian materi dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu: 1) penyampaian teori bersifat teoritis seperti definisi dana desa dan jenis pengelolaan dan pengembangan SDM, 2) praktik dengan studi kasus, dan 3) wawancara serta pengisian angket kuesioner. Adapun metode sosialisasinya menggunakan cara ceramah dilanjutkan simulasi dan tanya jawab. Kombinasi metode tersebut menurut tim pengabdian cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Sedangkan, untuk

pemaparan materi disampaikan oleh seorang ahli langsung dari dosen ilmu pemerintahan Universitas Jambi yang memang memahami tentang cara pengelolaan dana desa dari sudut teoritis maupun praktis. Hasil sosialisasi dan pelatihan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan setelah diberikan materi dengan metode sosialisasi dan pelatihan.

Gambar 2:

Sosialisasi dan Penyuluhan di Desa Simpang Empat Sungai Tutung



Saat kegiatan sosialisasi ini berlangsung, terlihat wajah antusias dari para peserta yang mengikuti pemaparan yang diberikan. Sesekali beberapa peserta langsung mengangkat tangan untuk bertanya kepada tim pengabdian dan pemateri. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi peserta dalam acara sosialisasi ini, ada anak-anak juga yang merupakan bagian dari kampung pendidikan di desa simpang empat sungai tutung ini.

Gambar 3:

Anak Didik Kampung Pendidikan Desa Simpang IV Sungai Tutung



3. Melakukan Identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh desa Simpang Empat Sungai Tutung.

Pada tahapan yang terakhir ini tim PKM mencoba untuk mengidentifikasi lagi tentang pemahaman yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Desa Simpang IV Sungai Tutung terkait pemamfaatan dana desa untuk kampung pendidikan di desa tersebut. Selain mengidentifikasi pemahaman dari pemerintah

desa, tim pkm juga mencoba untuk meberikan pemahaman kepada SDM yang dimiliki oleh desa simpang IV sungai tutung terkait cara dan pengetahuan tentang pengelolaan kampung pendidikan yang baik dan benar sesuai teori yang ada.

Kampung Pendidikan itu ada beberapa bentuk didalamnya, seperti yang dibawah ini:

1. Kampung Belajar: Dimana kampung belajar adalah bentuk dari kepedulian dan komitmen Warga desa simpang IV sungai tutung untuk menjamin terlaksananya lingkungan yang mendukung pendidikan anak dalam proses belajar anak.
2. Kampung Sehat: Adalah kampung yang memberikan suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang nyaman dan harmonis bagi warga dan anak-anak. Dimana warga kampung bebas dari penyakit atau kecacatan tetap.
3. Kampung Kreatif dan Inovatif: Kampung yang menyediakan ruang waktu, tempat untuk berekspresi, berkreasi dan inovasi bagi anak.
4. Kampung Literasi bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, maju dan mandiri melalui kegiatan membaca agar memiliki pengetahuan yang luas. Keberadaan kampung literasi akan memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan membudayakan minat baca serta mengembangkan sifat positif dan ketrampilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegitan PKM melalui transfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan dana desa yang dapat dikembangkan sebagai aset desa. Pengelolaan dana desa mulai mengarah pada penggunaan konsep berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, berdampak pada terbentuknya potensi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, yang terlihat dengan adanya usaha baru seperti UMKM dan tempat wisata yang mulai dijadikan sumber perekonomian masyarakat. Selain itu juga pengelolaan dana desa yang baik bisa dimanfaatkan untuk kemandirian desa seperti mendirikan kampung pendidikan yang ada di desa simpang IV sungai tutung kabupaten kerinci. Didalam membangun kampung pendidikan dibutuhkan suatu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai daya kompetitif yang baik. Sehingga dengan demikian bisa menjadikan kampung pendidikan desa simpang iv sungai tutung menjadi kampung yang mandiri dan percontohan bagi desa yang lainnya. Hal ini tidak akan mngkin berjalan dengan baik jika tidak didorong dengan dana desa yang ada. Maka dari itu pemamfaatan dana

desa yang baik juga menjadi penentu bagi kampung pendidikan di desa simpang iv sungai tutung ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah desa simpang Iv Sungai tutung beserta masyarakat yang sudah membantu berjalannya kegiatan pengabdian masyarakat sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa juga kami ucapkan beribu Terimakasih pada para dekanat di fakultas universitas jambi khususnya pihak LPPM Universitas Jambi yang sudah memberikan dana untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, "Kampung Pendidikan Dalam Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Desa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing," Jurnal Terapan Abdimas3, no. 2 (2018): 136.

Nilawati Evi, 'Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul', Jurnal Wacan Kerja, Volume 21, Nomor 1, 2018, hlm. 50.

M. Indra Maulana, Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 8.

Risma Hafid, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 18.

Wawancara dengan tokoh adat, tanggal 12 Januari 2018 di kediaman pak Mahbub.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 ayat 6.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.